BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Disamping Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Namun, setelah empat tahun berlakunya paket undang-undang tersebut, delapan tahun sejak otonomi yang luas kepada daerah, dan sepuluh tahun setelah reformasi, hampir belum ada kemajuan signifikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara/Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam tiga tahun terakhir secara umum masih buruk”. **(Sumber : Siaran Pers, BPK RI, 23 Juni 2008).**

Kondisi ini semakin memburuk yaitu dilihat dari persentase LKPD yang mendapatkan opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* dan *Wajar Dengan Pengecualian (WDP)* selama periode 2004-2007 semakin menurun setiap tahunnya. Persentase LKPD yang mendapatkan opini WTP semakin berkurang dari 7% pada tahun 2004 menjadi 5% pada tahun berikutnya dan hanya 1% pada tahun 2006 dan 2007. Sebaliknya, LKPD dengan opini *Tidak Memberikan Pendapat (TMP)* semakin meningkat dari 2% pada tahun 2004 menjadi 17% pada tahun 2007 dan pada periode yang sama opini *Tidak Wajar (TW)* naik dari 3% menjadi 19%. **(Sumber : Siaran pers BPK RI , 15 Oktober 2008)**

Kondisi yang semakin buruk ini sangat memprihatinkan mengingat dana yang dikelola oleh pemerintah adalah dana publik. Disamping itu, kondisi ini merupakan tantangan (tugas rumah) bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan mereka dengan menerapkan akuntansi menuju transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Sedangkan pada Pemerintah Kota Cimahi pada laporan keuangannya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) selama periode 2006-2008, jadi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah dapat dikatakan wajar namun masih dengan pengecualian misalnya pengecualian pada *Asset*. Aktiva tetap dan persediaan pada Standar Akuntansi Pemerintah sudah sesuai dengan pengelolaannya namun masih belum sesuai pada pencatatannya, pada *asset* yang sudah ada namun belum ada pada pencatatannya, jadi misalnya suatu barang yang sudah dibeli namun belum ada dicatatannya. Selain itu juga, kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya pada Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, dalam pengauditan pada kualitas hasil laporan keuangan tahun 2008 pada laporan arus kas yang telah di audit mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Walikota No. 11 Tahun 2009. Agar penelitian tidak terlalu meluas, maka penulis memilih salah satu jenis Kebijakan Akuntansi, yaitu kualitas hasil Laporan Keuangan. Sehingga Tugas Akhir ini diberi judul, **“Tinjauan Atas Penerapan Peraturan Walikota Cimahi No. 11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Di Pemerintah Kota Cimahi”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pemerintah pada Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
2. Bagaimana kualitas hasil laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pemerintah pada Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

2. Untuk mengetahui kualitas hasil laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Yaitu terdiri dari :

1. Bagi Pengembangan Ilmu
   Diharapkan dapat mengetahui kebijakan akuntansi terhadap kualitas hasil laporan keuangan pemerintah daerah yang saling berhubungan dengan laporan keuangan khususnya untuk pemerintah daerah. Serta untuk membandingkan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Mata kuliah yang terkait yaitu akuntansi sektor publik dan akuntansi keuangan.
2. Bagi Peneliti
   Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara teoritis maupun secara praktis juga pengalaman mengenai Peraturan Walikota Cimahi No.11 tentang kebijakan akuntansi terhadap kualitas hasil laporan keuangan. Peneliti berharap memperoleh informasi data yang akurat dan relevan, sehingga data tersebut bisa dipergunakan untuk kepentingan pembuatan tugas akhir. Selain itu penulis lebih mengetahui langsung pelaksanaan kebijakan akuntansi pada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Cimahi.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
   Dapat dijadikan sebagai referensi atau landasan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang mengambil tema tentang Penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Hasil Laporan Keuangan dan menjadi sumbangan ilmu yang berharga dibidang akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Yaitu terdiri dari :

1. Bagi Pemerintah Kota Cimahi
   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah kontribusi pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan suatu kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dan mengadakan perbaikan yang diperlukan untuk kebijakan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Dan bagi Pemerintah Kota Cimahi yang diteliti dapat memberikan informasi khususnya tentang Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi terhadap Kualitas Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi.
2. Bagian Keuangan
   Untuk karyawan Bagian Keuangan Pemerintah Kota Cimahi yang diteliti memberikan informasi tentang sejauh mana keefektifan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Cimahi, sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja menjadi lebih baik lagi, dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

BAB II
Kajian Pustaka Dan Kerangka Pemikiran

2.1 Kajian Pustaka

2.1.2 Pengertian Akuntansi Keuangan

Hal penting dari akuntansi keuangan adalah adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan aturan-aturan yang harus digunakan didalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan eksternal. Dengan demikian, diharapkan pemakai dan penyusun laporan keuangan dapat berkomunikasi melalui laporan keuangan, sebab mereka menggunakan acuan yang sama yaitu SAK. SAK ini mulai diterapkan di Indonesia pada 1994, menggantikan prinsip-prinsi akuntansi Indonesia tahun 1984. Tentang Akuntansi ini, Nordiawan (2007:4) menjelaskan bahwa bidang akuntansi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: akuntansi komersial, akuntansi sektor publik, dan akuntansi sosial. Akuntansi Pemerintahan merupakan bagian dari Akuntansi Sektor Publik. Selanjutnya, Nordiawan (2007:4) menyebutkan bahwa :

> "Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah".

2.1.3 Pengertian Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi menurut Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 hal.5 KK-2, bahwa : "Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan."

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 239 Permendagri No.13 Tahun 2006 menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud diatas, serta untuk tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Menurut Peraturan Walikota Cimahi No.11 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cimahi Pasal1 No.33, bahwa kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan prinsip-prisip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah adalah pemerintah suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan meneerapkan segala macam peraturan yang dibuat, dan pemerintah memegang segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri.

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal1 yaitu :

"Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Dari Pengertian tersebut pemerintah daerah dapat menyelenggarakan segala urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip negara.

Selanjutnya, dalam SE 900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, disebutkan bahwa dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu:

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
b. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Menurut Mursyidi (2009:1-2) yaitu :

"Akuntansi pada perkembangannya bergeser istilah akuntansi sektor publik. Istilah baru ini didasarkan pada pelebaran wilayah kajian dari akuntansi nirlaba, dimana akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sementara akuntansi sektor publik meluas pada semua entitas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya yayasan sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swata."

Terminologi untuk akuntansi pemerintahan, yang berkembang menjadi akuntansi sektor publik dapat disebut akuntansi keuangan publik, dan akuntansi dana masyarakat. Untuk pengertian akuntansi dana masyarakat diartikan sebagai berikut merupakan gambaran singkat tentang perbedaan akuntansi pemerintah dan akuntansi keuangan menurut Maursyidi (2009:2), sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Swasta

No.	Item Perbedaan	Akuntansi Sektor Publik	Akuntansi Sektor Swasta
1.	Tujuan	Kesejahteraan masyarakat	Keuntungan (hanya investor/*stockholders*)
2.	Organisasi	Sektor publik	Swasta
3.	Keuangan	Negara, Daerah, dan masyarakat	Individual

Sumber : Maursyidi, 2009 : 2

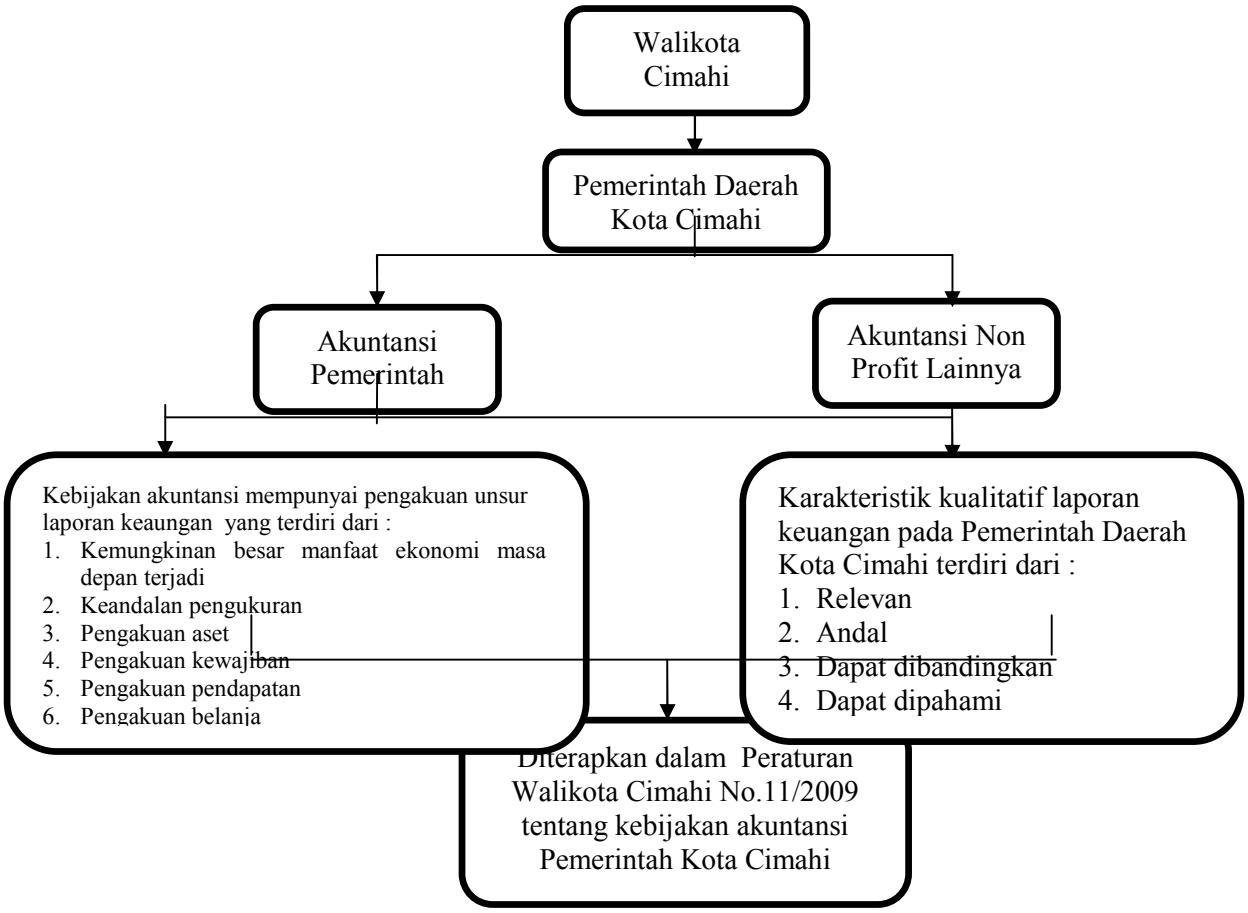
Pada kebijakan akuntansi pemerintah daerah, selama ini berpedoman pada PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah beserta pedoman dan aturan pelaksanaan berupa Buletin teknis, Peraturan Menteri Keuangan, Perdirjen Perbendaharaan, atau surat dirjen perbendaharaan yang sangat komprehensif. Kebijakan akuntansi tertuang dalam lampiran Perdirjen tersebut terdapat pada format catatan atas laporan keuangan, biasanya kebijakan akuntansi yang baru ditetapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada diterbitkan dalam bentuk surat.

Laporan keuangan menurut Maursyidi (2009:62), adalah :

"Laporan keuangan diidentifikasikan dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain dan disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya."

Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut standar akuntansi pemerintahan dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam pernyataan standar ini.

Dibawah ini adalah gambar dari kerangka pemikiran tentang kebijakan akuntansi terhadap kualitas hasil laporan keuangan, yaitu :



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Peraturan Walikota Cimahi No.11/2009
Tentang Kebijakan Akuntansi

BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2006:32) pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut :

"Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang diterapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan."

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi terhadap kualitas hasil laporan keuangan. Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Cimahi berasal dari adanya suatu peraturan baru yang harus diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2005:21), menyatakan bahwa :

"Metode Deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambar atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas."

Berdasarkan penelitian di atas yang dimaksud dengan metode analisis deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian yang ada yaitu tentang penerapan peraturan walikota cimahi no.11 tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi, sehingga metode ini harus diadakan akumulasi data.

Metode ini juga dapat dikatakan sebagai suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung.

3.2.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis, serta efektif.

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:10) menyatakan bahwa:

"Desain Penelitian adalah prosedur-prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan, pengumpulan, dan analisis data secara keseluruhan."

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo adalah sebagai berikut:

1. Studi Pendahuluan
   Studi pendahuluan merupakan tahap awal dalam penelitian ini, dimana dalam tahap ini peneliti mencari referensi untuk menetapkan judul penelitian yaitu Tinjauan Atas Penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi dengan membaca berbagai teori yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas, juga membandingkannya dengan penelitian yang telah ada.
2. Perumusan masalah dan Penentuan Tujuan Penelitian
   Perumusan masalah merupakan upaya yang dilakukan untuk merumuskan keadaan yang ada secara sistematis berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Seperti yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Peraturan Walikota Cimahi no.11/2009 tentang kebijakan akuntansi terhadap.
3. Pengumpulan Data
   Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi ke perusahaan dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dipakai adalah data yang bersifat kualitatif, yaitu data yang berbentuk teori. Menurut waktu pengumpulannya data bersifat *time series* data atau data deret waktu yang merupakan hasil pengamanan suatu periode tertentu (bulanan, triwulanan, atau tahunan).
4. Pengolahan Data
   Berdasarkan data-data yang telah terkumpul, terutama data mengenai kebijakan akuntansi, data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari kebijakan akuntansi, dengan menggunakan program aplikasi.
   Hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan penulis dalam pegolahan data dan pengujian statisitik.
5. Kesimpulan dan Saran
   Tahap akhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan yang diambil dari uraian-uraian yang ada pada bab pembahasan termasuk juga penarikan kesimpulan dari uji hipotesis. Selanjutnya juga akan disampaikan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan yang diteliti.

Dalam penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan paradigma sederhana, dimana hanya terdapat satu variable, yaitu variable independent. Yang menjadi variable independent (variable X) adalah penerapan peraturan walikota cimahi no.11 tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Untuk meneliti kebijakan akuntansi pada Peraturan Walikota No.11 Tahun 2009, penulis menentukan operasional variable. Operasionalisasi variable diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari varabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar, sesuai dengan judul penelitian.

Variable-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah:

a. Variable Independent (variable X)
   Variable independent atau variable bebas yaitu variable yang mempengaruhi atau menjelaskan variable yang lain yang tidak bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variable X adalah "penerapan peraturan walikota cimahi no.11 tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi"

Menurut http://adityasetyawan.files.wordpress.com/2009/01/variable-penelitian-dan-definisi-operasional-variable2.pdf skala ordinnal yaitu sebagai berikut :

"Skala Ordinal Adalah skala variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, himpunan yang beranggotakan menurut rangking, urutan, pangkat atau jabatan. Kategori yang dapat diurutkan atau diberi peringkat. Skala Ordinal adalah Skala Data Kontinum yang batas satu variasi nilai ke variasi nilai yang lain tidak jelas, sehingga yang dapat dibandingkan hanyalah nilai tersebut lebih tinggi, sama atau lebih rendah daripada nilai yang lain."

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala	No. Kuesioner
X Tinjauan atas Penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi	Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. (PW Cimahi No.11 (2009:5KK-2))	Pengakuan unsur laporan keuangan terdiri dari : 1. Kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi	Ordinal	1-2
		2. Keandalan pengukuran		3-4
		3. Pengakuan aset		
		4. Pengakuan kewajiban		5-7 8
		5. Pengakuan pendapatan		9-10
		6. Pengakuan belanja.		11-12
		(PW Cimahi No.11 (2009 hal:26))		
	Laporan keuangan adalah laporan mengenai posisi kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan serta informasi lainnya yang diperlukan oleh pemakai informasi akuntansi. www.AsianBrain.com oleh Anna Ahira	Karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu : 1.Relavan 2.Andal 3.Dapat dibandingkan 4.Dapat dipahami		13-15 16-18 19-20
				21-22
		PW Cimahi No.11 Tahun 2009 hal:19		

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data serta informasi yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini antara lain adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
   Penelitian Lapangan merupakan penelitian dengan melakukan peninjauan secara langsung ke instansi/perusahaan agar memperoleh data yang diperlukan melalui wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
   Data yang diperoleh merupakan data yang diperoleh dengan cara:
   a. Metode Observasi (Pengamatan)
      Yaitu penerapan Peraturan Walikota Cimahi no.11 tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi terhadap hasil laporan keuangan pada bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang telah ada dari segi pengumpulan data, dan sistem informasi akuntansi yang digunakan.
   b. Metode Interview (Wawancara)
      Yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada salah satu karyawan yaitu Bapak Fachmi dengan jabatan kepala bagian verifikasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
   c. Kuesioner
      Teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup. Suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden yang terdapat pada Bagian Keuangan di Pemerintah Kota Cimahi, dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.
   d. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis menelaah laporan keuangan pada bagian keuangan Pemerintah Kota Cimahi yang didapat oleh penulis selama empat bulan. Dokumen yang penulis cari yaitu tentang Penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
   Penelitian pustaka adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan materi pembahasan guna dijadikan dasar dalam melakukan penilaian dan perbandingan dari penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku literatur, buku teks, dan catatan kuliah, dengan metode ini akan diperoleh gambaran mengenai Penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi terhadap kualitas hasil laporan keuangan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian pada Pemerintah Kota Cimahi mengenai peranan Peraturan Walikota No.11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi adalah penulis dapat mengetahui bagaimana peranan dan dapat mengetahui kualitas hasil laporan keuangan yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Penerapan Pemerintah Pada Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi

1. **Kemungkinan besar ekonomi masa depan terjadi**

Berikut gambaran tanggapan 26 pengakuan unsur laporan keuangan :

Tabel 4.9
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kemungkinan Besar Masa Ekonomi Terjadi pada Penyusunan Laporan Keuangan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	26	100%	130
Setuju	4	0	0.00%	0
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**130**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{130}{130} \times 100\%$$

$$= 100\ \%$$

Pada umumnya responden sependapat bahwa bagian akuntansi pada pengakuan unsur laporan keuangan pada kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi pada penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Persentase skor tanggapan responden sebesar 100% termasuk dalam kategori yang sangat baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan pada Pemerintah daerah Kota Cimahi sudah memahami tentang pengakuan unsur laporan keuangan pada kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi.

Tabel 4.10
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pos atau Kejadian akan Mengalir dari atau Ke entitas pelaporan pada manfaat ekonomi masa depan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	0
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \times 100\%$$

$$= 80\ \%$$

Sebagian besar responden sependapat bahwa bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada entitas pelaporan keuangannya pada manfaat ekonomi masa depan terjadi pos atau kejadian peristiwa akan mengalir ke entitas pelaporan. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan bahwa pos atau kejadian/peristiwa akan selalu mengalir dari atau ke entitas pelaporan manfaat ekonomi masa depan terjadi.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran ketaatan pada kode etik secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada tabel 4.6.

Tabel 4.11

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Indikator Kemungkinan Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Kemungkinan Besar Masa Ekonomi Terjadi pada Penyusunan Laporan Keuangan	130	130	100%	Sangat Baik
2	Mempertahankan Kepercayaan Pemberi Tugas	104	130	80%	Baik
	Total	234	260	90%	Sangat Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{234}{260} \times 100\%$$

$$= 90\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator Kemungkinan Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi sudah sangat baik yaitu dengan hasil sebesar 90%.

2. **Keandalan Pengukuran**

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Tabel 4.12

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Biaya dan Estimasi Pada pengakuan transaksi pada CaLK

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \times 100\%$$

$$= 80\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa pada biaya dan estimasi pada pengakuan transaksi pada calk sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80 % termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Tabel 4.13

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pos Atau Peristiwa Dapat Terjadi Pada Keandalan Pengukuran

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	0
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \times 100\%$$

$$= 80\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa pada pos atau peristiwa dapat terjadi pada keandalan pengukuran sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80 % termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran ketaatan pada kode etik secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada tabel 4.14

Tabel 4.14

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Indikator Keandalan Pengukuran

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Kemungkinan Besar Masa Ekonomi Terjadi pada Penyusunan Laporan Keuangan	104	130	80%	Baik
2	Mempertahankan Kepercayaan Pemberi Tugas	104	130	80%	Baik
	Total	208	260	80%	Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{208}{260} \times 100\%$$

$$= 80\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator keandalan pengukuran sudah baik yaitu dengan hasil sebesar 80%.

3. **Pengakuan Aset**

Tabel 4.15

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Aset Diakui Pada Saat Potensi Manfaat Ekonomi Masa Depan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \times 100\%$$

$$= 80\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa pada aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80 % termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Tabel 4.16
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengakuan Penerimaan Kas Oleh Pemerintah Kota Cimahi

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	0
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \times 100\%$$

$$= 80\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa pada aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dan pengakuan peneriman kas oleh Pemerintah Kota Cimahi untuk mendaptakan pengakuan akuntansi membutuhkan pengaturan yang lebih rinci, hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80 % termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Tabel 4.17
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengakuan Aset Pemerintah Kota Cimahi

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$104$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{}{130} X\ 100\%$$

$$= 80\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa pada aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dan pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah Kota Cimahi untuk mendaptakan pengakuan akuntansi membutuhkan pengaturan yang lebih rinci, aset akan sesuai jika telah terjadi dan manfaat ekonominya yng mungkin dipandang untuk diperoleh Pemerintah Kota Cimahi setelah periode akuntansi berjalan, hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80 % termasuk dalam kategori baik.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran ketaatan pada kode etik secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada tabel berikut:

Tabel 4.18

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Indikator Keandalan Pengukuran

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Kemungkinan Besar Masa Ekonomi Terjadi pada Penyusunan Laporan Keuangan	104	130	80%	Baik
2	Mempertahankan Kepercayaan Pemberi Tugas	104	130	80%	Baik
3	Pengakuan Aset Pemerintah Kota Cimahi	104	130	80%	Baik
	Total	312	390	80%	Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} X\ 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{312}{390} X\ 100\%$$

$$= 80\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator pengakuan aset sudah baik yaitu dengan hasil sebesar 80%

4. **Pengakuan Kewajiban**

Pengakuan diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Tabel 4.20

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengakuan Penerimaan Kas Oleh Pemerintah Kota Cimahi

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} X\ 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} X\ 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa pengakuan kewajiban sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran ketaatan pada kode etik secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada tabel berikut:

Tabel 4.21

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Indikator Pengakuan Kewajiban

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Pengakuan kewajiban pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul	104	130	80%	Baik
	Total	104	130	80%	Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} X\ 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{104}{130} X\ 100\%$$

$$= 80\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator pengakuan kewajiban sudah baik yaitu dengan hasil sebesar 80%.

5. **Pengakuan Pendapatan**

Pengakuan pendapatan diakui pada saat diterima direkening kas umum daerah untuk seluruh transaksi PPKD, maksudnya pengakuan pendapatan dengan berbasis kas diakui dan dicatat pada saat kas atau setara kas diterima yang menambah ekuitas dana lancar. Pendapatan di PPKD diakui pada saat diterima direkening kas umum daerah.

Tabel 4.23

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} X\ 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} X\ 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa pengakuan pendapatan sudah sesuai pada saat rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan pendapatannya diakui dan sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Tabel 4.24
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Timbulnya Hak Atas Pengakuan Pendapatan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} X\ 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} X\ 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa pengakuan pendapatan sudah sesuai pada saat timbulnya hak atas pengakuan pendapatan sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran ketaatan pada kode etik secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada tabel 4.25.

Tabel 4.25
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Indikator Pengakuan Pendapatan

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan	104	130	80%	Baik
2	Timbulnya Hak Atas Pengakuan Pendapatan	104	130	80%	Baik
	Total	208	260	80%	Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} X\ 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{208}{260} X\ 100\%$$

$$= 80\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator pengakuan pendapatan sudah baik yaitu dengan hasil sebesar 80%.

6. **Pengakuan Belanja**

Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umu daerah atau entitas pelaporan khusus pengeluaran mengenai bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Tabel 4.27
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Terjadi Pengeluaran Di Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa pengakuan belanja terjadi pengeluaran di rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80%termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Tabel 4.28

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengakuan Belanja Mempunyai Fungsi Perbendaharaan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa pengakuan Mempunyai Fungsi Perbendaharaan sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran ketaatan pada kode etik secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada tabel berikut:

Tabel 4.29

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Indikator Pengakuan Belanja

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Terjadi Pengeluaran Di Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan	104	130	80%	Baik
2	Pengakuan Belanja Mempunyai Fungsi Perbendaharaan	104	130	80%	Baik
	Total	208	260	80%	Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{208}{300} X\ 100\%$$

$$= 80\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator pengakuan belanja sudah baik yaitu dengan hasil sebesar 80%.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran auditor internal bersertifikasi Qualified Internal Auditor secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kelima indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel 4.26

Tabel 4.31

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi	234	260	90%	Sangat Baik
2	Keandalan penggukuran	208	260	80%	Baik
3	Pengakuan aset	312	390	80%	Baik
4	Pengakuan kewajiban	104	130	80%	Baik
5	Pengakuan pendapatan	208	260	80%	Baik
6	Pengakuan belanja	208	260	80%	Baik
	Total	1274	1560	81.67%	**Baik**

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi sudah sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh Walikota Cimahi. Artinya penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah tinggi. Berasarkan hasil kuesioner yang telah penulis buat untuk bagian keuangan Pemerintah Kota Cimahi, sehingga penulispun dapat membuat kesimpulan bahwa pada Penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi terhadap Kualitas Hasil Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kota Cimahi, pada pengakuan unsur laporan keuangan yang didalamnya berisi kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi, keandalan pengukuran, pengakuan aset, pengakuan kewajiban, pengakuan pendapatan, dan pengakuan belanja sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

4.2.2 Analisis Kualitas Hasil Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi

1. Relevan

Kualitas hasil laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan jika informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan dimasa lalu.

Tabel 4.32

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Informasi Yang Termuat Dapat Mempengaruhi Keputusan Laporan Keuangan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} X\ 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} X\ 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah relevan karena informasi yang termuat dapat mempengaruhi keputusan laporan keuangan, oleh karena itu kualitas hasil laporan keuangan Pemerintah Kota Cimahi sudah sesuai dengan peraturan yang sudah

ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Tabel 4.33
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Informasi Laporan Keuangan Yang Relevan Sudah Sesuai Dengan Penggunaannya

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \times 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah relevan karena informasi yang termuat dapat mempengaruhi keputusan laporan keuangan, dan pada laporan keuangannya sudah sesui dengan penggunaannya, oleh karena itu kualitas hasil laporan keuangan Pemerintah Kota Cimahi sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Tabel 4.34
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Masih Terjadi Kekeliruan Dalam Pengguna Informasi Yang Relevan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{150} \times 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa kekeliruan dalam pengguna informasi yang relevan tersebut dapat dicegah apabila kekeliruan tersebut masih terjadi, dan menurut hasil kuesionernya sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran ketaatan pada kode etik secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada tabel 4.35.

Tabel 4.35
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Indikator Relevan

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria

1	Informasi Yang Termuat Dapat Mempengaruhi Keputusan Laporan Keuangan	104	130	80%	Baik
2	Informasi Laporan Keuangan Yang Relevan Sudah Sesuai Dengan Penggunaannya	104	130	80%	Baik
3	Masih Terjadi Kekeliruan Dalam Pengguna Informasi Yang Relevan	104	130	80%	Baik
	Total	312	390	80%	Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{312}{390} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator relevan sudah baik yaitu dengan hasil sebesar 80%.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengerian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Tetapi jika hakikat atu penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguana informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Tabel 4.36
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengertian Yang Menyesatkan dan Kesalahan Material Pada Laporan Keuangan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Hampir keseluruhan responden sependapat bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah relevan karena informasi yang termuat dapat mempengaruhi keputusan laporan keuangan, dan pada laporan keuangannya sudah sesui dengan penggunaannya. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Tabel 4.37
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Menyajikan Laporan Keuangan Dengan Jujur Untuk Disajikan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

Skor aktual

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \times 100\%$$

$$= 80\%$$

Hampir keseluruhan responden sependapat bahwa suatu laporan keuangan sudah menyajikan dengan jujur untuk disajikan. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Tabel 4.38

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Informasi Yang Diarahkan Untuk Memenuhi Kebutuhan Umum

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \times 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas keseluruhan responden sependapat bahwa informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum pada pihak tertentu sudah tidak merugikan pihak lain, berarti laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah andal, dan pada laporan keuangannya sudah sesui dengan penggunaannya. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran tentang andal secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada tabel 4.39.

Tabel 4.39

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Indikator Andal

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Pengertian Yang Menyesatkan dan Kesalahan Material Pada Laporan Keuangan	104	130	80%	Baik
2	Menyajikan Laporan Keuangan Dengan Jujur Untuk Disajikan	104	130	80%	Baik
3	Informasi Yang Diarahkan Untuk Memenuhi Kebutuhan Umum	104	130	80%	Baik
	Total	312	390	80%	Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

312

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{X 100\%}}{390}$$

$$= 80\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator andal sudah baik yaitu dengan hasil sebesar 80%.

3. Dapat Dipahami

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Tabel 4.40
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengguna Laporan Yang Mengasumsikan memiliki Pengetahuan Yang Memadai

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas keseluruhan responden sependapat bahwa pada Pemerintah Kota Cimahi pada pengguna laporan telah mengasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat dipahami, berarti laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah dapat dipahami karena informasi yang termuat dapat mempengaruhi keputusan laporan keuangan, dan pada laporan keuangannya sudah sesui dengan penggunaannya. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Tabel 4.41
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Yang Dapat Dipahami

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas keseluruhan responden sependapat bahwa pengguna laporan keuangan mempunyai kemampuan untuk mempelajari informasi pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dapat dipahami yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi dan sudah tidak merugikan pihak lain, berarti laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah dapat dipahami. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan

bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran indikator dapat dipahami pada karakteristik kualitatif laporan keuangan secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada tabel 4.42.

Tabel 4.42
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Indikator Dapat Dipahami

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Pengguna Laporan Yang Mengasumsikan memiliki Pengetahuan Yang Memadai	104	130	80%	Baik
2	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Yang Dapat Dipahami	104	130	80%	Baik
	Total	208	260	80%	Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} X\ 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{208}{260} X\ 100\%$$

$$= 80\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden pada kuesioner no. 21-22 maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator dapat dipahami pada karakteristik kualitatif laporan keuangan sudah baik yaitu dengan hasil sebesar 80%

4. Dapat Dibandingkan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahamannpara pengguan laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Tabel 4.43
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Laporan Keuangan Yang dapat Dibandingkan Dengan Pemerintah Daerah Lain

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	26	100%	130
Setuju	4	0	0.00%	0
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**130**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} X\ 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{130}{130} X\ 100\%$$

$$= 100\ \%$$

Mayoritas keseluruhan responden sependapat bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Cimahi sudah dapat dibandingkan dengan pemerintah daerah lain, berarti alporan keuangan Pemerintah Kota Cimahi sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Cimahi. Persentase skor tanggapan responden sebesar 100 % termasuk dalam kategori sangat baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Tabel 4.44
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Perubahan Kebijakan Akuntansi

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \times 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas keseluruhan responden sependapat bahwa dalam menerapkan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan kebijakan akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah dapat dipahami karena informasi yang termuat dapat mempengaruhi keputusan laporan keuangan, dan pada laporan keuangannya sudah sesui dengan penggunaannya. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran indikator dapat dipahami pada karakteristik kualitatif laporan keuangan secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada tabel 4.45.

Tabel 4.45
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Indikator Dapat Dibandingkan

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Pengguna Laporan Yang Mengasumsikan memiliki Pengetahuan Yang Memadai	104	130	80%	Baik
2	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Yang Dapat Dipahami	104	130	80%	Baik
	Total	208	260	80%	Baik

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran auditor internal bersertifikasi Qualified Internal Auditor secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kelima indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.46
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Kualitas Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Relevan	312	390	80%	Baik
2	Andal	312	390	80%	Baik
3	Dapat Dipahami	208	260	80%	Baik
4	Dapat Dibandingkan	208	260	80%	Baik
	Total	1040	1300	80%	**Baik**

Kualitas hasil Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi sudah sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh Walikota Cimahi.

Pada kualitas hasil laporan keuangan yaitu laporan keuangan Pemerintah Kota Cimahi sudah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pemerintah daerah lain. Dari hasil kuesioner ini bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah menerapkan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh Walikota Cimahi.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pada penerapan Peraturan Walikota Cimahi no.11 tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi yang terdapat pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah mengacu pada peraturan yang telah ditentukan oleh Walikota Cimahi, dimana kebijakan akuntansi telah dilakukan oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan peraturan yang telah dibuat oleh Walikota Cimahi pada tahun 2009.
2. Kualitas hasil laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi para pengguna perlu membandingkan laporan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material.

5.2 Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian pada penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009, kebijakan akuntansi para pengguna perlu membandingkan laporan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk dapat mengetahui *trend* posisi keuangan, kinerja, dan arus kas, sebaiknya mengikuti Peraturan yang telah diberlakukan oleh Walikota Cimahi yang telah diterapkan pada tahun 2009.
2. Berdasarkan hasil penelitian kualitas hasil laporan keuangan pada Bagian Keuangan, agar dapat membandingkan laporan keuangannya dari suatu entitas ke entitas lain, agar kebijakan akuntansi yang digunakan dapat diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Pada kualitas hasil laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi laporan keuangannya sudah sesuai dengan SAP dan peraturan yang sudah ada. Pada laporan keuangannya sudah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah lain, dan diharapkan agar Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat mempertahankan kualitas laporan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengelolaan Keuangan Tahun 2002

http://wikipedia/Sugiarto_ *Pengantar Akuntansi* _Pusat Penerbitan Universitas Terbuka_ Jakarta, 2002

http : // wikipedia / Sugiarto / *Pengantar – Akuntansi* / Pusat-Penerbitan-Universitas-Terbuka-Jakarta-2002

http://uziek.blogspot.com

http://thinkquantum.wordpress.com/2009/11/02

http://adityasetyawan.files.wordpress.com/2009/01/variable-penelitian-dan-definisi-operasional-variable2.pdf

http://organisasi.org Komunitas & Perpustakaan Online Indonesia

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Yogyakarta : BPEE-Yogyakarta.

Irawati, Susan., 2007. *Akuntansi Dasar 1&2.* Bandung : Salemba Empat.

Maursyidi, 2009. *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Bandung : Rafika Aditama.

Nordiawan, Deddi. dkk. *Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta: Salemba Empat.

Pasal 239 Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nommor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kebijakan Akuntansi,* dan lampiran-lampirannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

SE 900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli Tahun 2009

Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Bisnis,* Bandung : CV.Alfabeta

Sugiyono, 2005. *Statistika Untuk Penelitian.* Bandung : CV. Alfabeta.

Umi Narimawati.2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Agung Media, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang *Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*

www.google.com Davis dalam bukunya *Yamit Tahun 2004.*

www.google.com Definisi Kualitas yang dikemukakan para ahli diantaranya Suardi Tahun 2009